

**Proposal Hibah Skala Kecil  
RIT-CEPF Wallacea Biodiversity Hotspot**

---

<b>Informasi Organisasi</b>
<b>Nama Organisasi:</b> <b>LPPM – Maluku</b> <b>(Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat)</b>
<b>Kategori Organisasi:</b>  <input type="checkbox"/> Organisasi Masyarakat (Agama/Pemuda/Parpol/Perempuan/Veteran) <input type="checkbox"/> Organisasi Basis (Kel. Tani/Nelayan/Pengelola Hutan/Masyarakat Adat/Koperasi) <input type="checkbox"/> LSM/NGO Lingkungan Hidup/Konservasi <input checked="" type="checkbox"/> LSM/NGO Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat <input checked="" type="checkbox"/> Organisasi Sosial/Kesehatan Masyarakat <input checked="" type="checkbox"/> Lembaga Advokasi/ <del>Bantuan Hukum</del> <input checked="" type="checkbox"/> Lembaga Pendidikan/Penyuluh/Penyadaran Masyarakat <input type="checkbox"/> Organisasi Profesional/Kelompok Intelektual <input type="checkbox"/> Lembaga Penelitian/Kajian/Universitas <input type="checkbox"/> Bagian dari perusahaan yang bergerak untuk kepedulian sosial dan lingkungan (CSR) <input type="checkbox"/> Media
<b>Nama Penanggung Jawab Organisasi: Petrus. W. Wairissal</b>
<b>Nama Koordinator Proyek: Noni R. Tuharea</b>
<b>Alamat Email Organisasi: lppm_maluku@yahoo.com</b>
<b>Alamat Organisasi :</b> <b>Kota Ambon - Jl. Martha Christina Tiahahu No 24 RT.001/01 Ambon 97122.</b> <b>Kab. SBB - Jl Trans Seram Desa Nurue (Upe Kolam), Kecamatan Kairatu Barat</b>
<b>No Telepon Organisasi : +62911-349423</b>
<b>No Fax Organisasi (jika ada) : +62911-349423</b>
<b>Website Organisasi : www.lppmambon.org</b>

**Jumlah Staf tetap:**

- a. Laki-laki : 4 Orang
- b. Perempuan : 4 orang

**Akte Pendirian Organisasi (lengkapi dengan copy 1 rangkap): No 4 Tahun 1994****Sejarah, Visi dan misi Organisasi :**

*LPPM dibentuk oleh mantan staf Project Concern International (PCI/ Maluku), sebagai manifestasi kepedulian, pemberdayaan masyarakat dan membangun kemandirian bagi rakyat Maluku. Secara juridis LPPM disahkan pada tanggal 4 Juni 1994 melalui Akta Notaris No. 4/1994. LPPM bersifat Nirlaba dan Independent, tidak berpihak pada aliran politik, Keagamaan, Kesukuan, maupun Ras serta strata sosial masyarakat tertentu.*

**Visi:**

*Sebagai salah satu lembaga mandiri konsisten dengan berbagai program partisipatif, untuk menjadikan masyarakat mandiri, memiliki posisi tawar terhadap negara, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan menuju organisasi masyarakat sipil yang mandiri.*

**Misi:**

1. *Bekerja di Maluku untuk meningkatkan kesehatan, advokasi, pengetahuan serta meningkatkan pendapatan masyarakat*
2. *Melaksanakan Prinsip tata kelola organisasi yang baik dan bersih*
3. *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia*
4. *Meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat*

**Pengalaman yang relevan dengan usulan proyek:**

1. *Program Penguatan ekonomi perempuan pesisir di Desa Nuruwe, Kab. SBB, PTDDA-UNDP-PDT, 2015*
2. *Program Inkubasi Bisnis Outwall tahap Awal bagi perempuan pesisir di Desa Nuruwe, Kab. SBB, Kementerian Transmigrasi (BBPPK & PPK Lembang), 2015*
3. *Menjadi Konsultan dalam pengembangan Program Making Market for Poor (M4P) Mercy Corps Indonesia di Kabupaten SBB dan Maluku Tenggara khususnya untuk bidang kelautan. Tahun 2014*
4. *Program Pelatihan Ketrampilan bagi pemda Putus Sekolah Di Maluku, ILO EAST.*

**Penilaian Kelayakan**

Dana CEPF hanya digunakan untuk jenis organisasi dan kegiatan tertentu. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di [www.wallacea.org](http://www.wallacea.org) atau mengirimkan email ke [hibah.wallacea@burung.org](mailto:hibah.wallacea@burung.org), atau menghubungi Rini Suryani (Grant Management Officer) di 0811 1975 836.

Apakah organisasi anda berada di bawah kendali/bertanggung kepada/dibiayai oleh pemerintah?

**Tidak**

Apakah aktivitas di dalam proyek ini termasuk melakukan pembelian tanah?

**Tidak**

Apakah aktivitas dalam proyek ini akan melibatkan pemindahan atau perubahan atas suatu objek atau bangunan yang bernilai budaya (termasuk benda bergerak dan tidak bergerak, situs, struktur, dan lanskap yang mengandung nilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama, estetika, atau nilai budaya lainnya)?

**Tidak**

Apakah proyek ini akan melibatkan pemindahan penduduk atau aktivitas lain yang termasuk dalam kategori pemindahan paksa?

**Tidak**

<b>Penjelasan Proyek</b>
<p><b>Judul Proyek :</b></p> <p>PERLINDUNGAN KAWASAN PESISIR BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI PESISIR P. BUANO</p>
<p><b>Lokasi Proyek :</b></p> <p>a. Negara : Indonesia</p> <p>b. Provinsi : Maluku</p> <p>c. KBA : Buano</p> <p>d. Kabupaten/kota : Kabupaten Seram Bagian Barat</p> <p>e. Desa : Desa Buano Utara</p>
<p><b>Durasi Proyek :</b> <i>Dua Belas Bulan (1 tahun)</i></p>
<p><b>Arahan Strategis dari Profil Ekosistem Wallacea CEPF:</b></p> <p>[ ] 1. Tindakan untuk mengatasi ancaman yang spesifik bagi <b>spesies</b> prioritas</p> <p>[ ] 2. Meningkatkan pengelolaan <b>kawasan</b> (KBA) yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi</p> <p>[ ] 3. Mendukung <b>pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan</b> yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan dan koridor prioritas</p> <p>[<input checked="" type="checkbox"/>] 4. Memperkuat aksi <b>berbasis masyarakat</b> untuk melindungi spesies dan kawasan <b>laut</b></p> <p>[ ] 5. Melibatkan <b>sektor swasta</b> sebagai peserta aktif dalam konservasi kawasan dan koridor prioritas, di bentang alam produktif, dan di seluruh Wallacea</p> <p>[ ] 6. Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk aksi konservasi yang efektif di Wallacea</p>
<p><b>Jumlah Dana yang Diusulkan:</b></p> <p><b>Rp. 260.000.000</b></p>
<p><b>Total Dana Proyek:</b></p> <p><b>Rp. 260.000.000</b></p>
<p><b>Anggaran Proyek :</b> <i>(terlampir dalam format excel)</i></p>

### **Aspek Kerangka Pengaman**

Jika jawaban untuk salah satu atau lebih dari pertanyaan-pertanyaan berikut adalah Ya, sebutkan dampak potensial yang akan muncul dan cara menghindari atau menguranginya. RIT dapat meminta pemohon untuk memberikan informasi tambahan dan dokumentasi proyek jika proyek tersebut memiliki potensi untuk memicu Kerangka Pengaman (*Safeguards*).

Untuk informasi lebih lanjut tentang aspek Kerangka Pengaman, silakan email

[hibah.wallacea@burung.org](mailto:hibah.wallacea@burung.org) atau hubungi Rini Suryani (Grant Management Officer) di 0811 1975 836

### **Aspek Lingkungan**

**Apakah proyek yang diusulkan melibatkan kegiatan yang mungkin memiliki dampak buruk terhadap lingkungan?**

Iya

Tidak

**Keterangan - Berikan penjelasan mengenai dampak terhadap lingkungan dan mitigasinya jika jawaban pertanyaan di atas adalah Ya.**

### **Aspek Sosial**

**Apakah proyek yang diusulkan melibatkan kegiatan yang cenderung memiliki dampak buruk/negatif pada masyarakat lokal?**

Ya

Tidak

**Keterangan - Berikan penjelasan mengenai dampak sosial dan mitigasinya jika jawaban pertanyaan di atas adalah Ya.**

## Proposal

Bagian ini adalah untuk memberikan gambaran dari konsep proyek, dan harus menyertakan setidaknya informasi sebagai berikut:

### a. Alasan proyek

Perairan Pulau Buano terletak di Kecamatan Huamual Belakang kabupaten Seram Bagian Barat. Pulau Buano dihuni oleh sekitar **14.237** jiwa dengan luas wilayah perairan mencapai **13.616** ha dengan jumlah nelayan kurang lebih sekitar **1.200** orang. Pulau Buano berada pada sebagian laut seram dan laut Banda dengan keanekaragaman hayati laut yang cukup tinggi. Berdasarkan Penelitian Ikan Karang oleh LIPI Ambon pada tahun 2012 di Barat dan Utara Pulau Marsegu (Terletak di sebelah utara Pulau Buano), Patch Reef Pulau. Sarane (barat daya Pulau Buano), Utara Pulau. Rafles dan Selat Valentine (Tr.5), terdapat sebanyak **198** spesies, **2169** individu dan 27 famili tersensus dengan kelimpahan tiap jenis antara **131–4892** ind/ha. Selain itu kondisi karang berada pada kategori Baik. Wilayah pantai di Pulau Buano didominasi oleh pasir putih dan hutan bakau.

Saat ini ekosistem laut pulau Buano dan sekitarnya mulai terancam terutama bagi populasi ikan Pelagis kecil dan besar, Layar, Pari dan lola sebagaimana yang dilaporkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), karena berlangsungnya praktek eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tidak berkelanjutan (penggunaan bom, potassium dan racun cianida), penambangan karang laut untuk kebutuhan pembangunan rumah penduduk serta penebangan bakau sebagai kayu bakar. Masalah lain yang juga mempunyai kontribusi yang cukup tinggi adalah seperti terjadinya *illegal fishing* baik yang dilakukan oleh nelayan local maupun nelayan asing, terjadinya masalah *sedimentasi*, dan lain-lain. Kondisi diatas diperparah lagi dengan tidak adanya/ belum pernah dilakukan intervensi program baik dari pemerintah maupun pihak lain pada wilayah Pulau Buano.

Berangkat dari sejumlah permasalahan di atas, maka sekiranya program konservasi ini tidak segera dilaksanakan maka dipastikan dalam beberapa tahun kedepan ekosistem pesisir akan semakin rusak dan pendapatan masyarakat di Desa Buano Utara yang hidup dari hasil sumber daya pesisir akan semakin menurun bahkan secara perlahan akan punah.

### B. Adakah dampak dari pelaksanaan proyek ini bagi:

1. Jenis-jenis prioritas yang terdapat di dalam kawasan pesisir  
Implementasi program akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menjaga dan melindungi ekosistem pesisir dengan berperan aktif dan inisiatif melakukan kegiatan-kegiatan penanaman bakau sebagai tempat berlindung ikan dan biota lainnya serta dapat dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan dan penghidupan masyarakat yang lebih baik, selain itu, secara tidak langsung, masyarakat akan membantu merehabilitasi terumbu karang.
2. Pengelolaan Kawasan Pesisir yang lebih baik  
Adanya kelompok perlindungan kawasan pesisir (KPWP) yang lahir dari kesadaran masyarakat dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat serta diketahui dan mendapat dukungan oleh pemerintah melalui aturan local dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. Selain itu masyarakat dan Pemerintah mampu melakukan pemetaan kebutuhan serta membuat rencana program yang berkelanjutan untuk perlindungan ekosistem pesisir.
3. Masyarakat di sekitar KBA dan stakeholder terkait lainnya  
Adanya mata pencaharian alternatif meningkatkan pendapatan masyarakat
  - a. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam perlindungan ekosistem pesisir
  - b. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas dan badan teknis terkait memberikan perhatian dan

- pendampingan teknis kepada masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem wilayah pesisir
- c. Pemerintah Desa memiliki otoritas dan dapat mengontrol pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.

**C. Tujuan Proyek:**

Habitat Di Pesisir Desa Buano Utara Akan Lebih Terlindungi Dengan Partisipasi Masyarakat

**D. Keluaran proyek:**

1. Tersedia aturan lokal pengelolaan dan perlindungan pesisir di Pulau Buano Utara
2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan

**E. Aktivitas Proyek:**

<b>Keluaran 1</b>	Aktivitas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi gagasan tentang perumusan aturan lokal pengelolaan wilayah pesisir</li> <li>2. Melakukan kajian partisipatif</li> <li>3. Memfasilitasi penyusunan aturan lokal ditingkat desa terkait pengelolaan dan perlindungan sumber daya pesisir berbasis masyarakat</li> <li>4. Melakukan uji publik draft aturan lokal tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir bagi stakeholder pemerintah dan masyarakat</li> <li>5. Finalisasi aturan lokal di tingkat desa</li> </ol>
<b>Keluaran 2</b>	Aktivitas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Kelompok Perlindungan Pesisir (KPS)</li> <li>2. Melakukan penyadaran tahunan untuk mendorong pengawasan dan perlindungan kawasan pesisir secara partisipatif di Buano Utara</li> <li>3. Melaksanakan pelatihan vokasional pengelolaan sumber daya pesisir berbasis lingkungan berkelanjutan.</li> </ol>

**Kaitan dengan Strategi Investasi CEPF**

Aktivitas yang merusak kawasan pesisir Pulau Buano secara sadar maupun tidak terus dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Buano Utara. Kondisi ini dapat dilihat dengan semakin berkurangnya jumlah pohon bakau dan karang karena alasan pembangunan pemukiman dan peningkatan pendapatan keluarga. Disamping itu praktek penangkapan ikan yang destruktif masih marak terjadi dan belum mendapat perhatian serius dari masyarakat. Karenanya melalui pemberdayaan intensif masyarakat pesisir yang dilakukan oleh LPPM melalui peningkatan kapasitas maka masyarakat di Pulau Buano Utara mampu berpartisipasi aktif menjaga dan melindungi kawasan pesisir melalui kearifan local untuk memperkuat upaya perlindungan kawasan pesisir. Disamping itu juga serangkaian peningkatan kapasitas dan ketrampilan akan difasilitasi guna meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta mampu memberikan penghidupan bagi masyarakat.

**Mitra Kerja dalam Proyek / Stakeholders**

Nama Mitra Kerja	Peran Mitra dalam Proyek ini
LIPi Ambon	Konsultan program, Pendamping teknis
BKSDA Kabupaten Seram Bagian barat	Pendamping Teknis dan memfasilitasi usulan

	pembuatan regulasi
DKP Kabupaten seram Bagian Barat	Pendamping Teknis dan Pendamping Teknis dan memfasilitasi usulan pembuatan regulasi
Pemerintah Desa Buano Utara	Memberikan rekomendaasi, dukungan, arahan, kebijakan dan pendampingan
Masyarakat	Keberlanjutan ekosistem SDA

#### **Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial**

Sedikitnya 30% perempuan akan berpartisipasi dalam program dan mendapat manfaat langsung, melalui keterlibatan secara aktif dalam setiap tahapan aktivitas program yang dilakukan. Peserta pelatihan vokasional akan diarahkan untuk perempuan dan laki-laki dengan presentasi 30% adalah perempuan. Melalui pertimbangan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak kemiskinan, maka diharapkan melalui pelatihan vokasional kelompok perempuan memiliki pendapatan sendiri sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga mereka melalui usaha pengolahan hasil laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

#### **Keberlanjutan Jangka panjang**

1. Membangun dan membuka akses kerjasama masyarakat dengan berbagai pihak dalam aksi perlindungan wilayah pesisir.
2. (Mendorong/menjamin) program konservasi alam masuk dalam program kerja pemerintah desa/negeri yang dibiayai oleh bantuan dana desa oleh pemerintah.
3. Koordinasi secara rutin dengan pemerintah daerah dan merekomendasikan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati kepada pemerintah daerah untuk ditindak-lanjuti melalui kebijakan-kebijakan programnya
4. Kelompok usaha yang telah dilatih didorong untuk menjadi menjadi industry pengolahan hasil laut dan memiliki legalitas sehingga dapat menjual prodaknya ke pasar local maupun nasional.